BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Analisa Pelaksanaan Administrasi Kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang

Berdasarkan penelitian penulis selama kerja praktek di Bank Jabar Cabang Soreang bahwa pelaksanaan administrasi kredit Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu di Bank Jabar Cabang Soreang.

Dalam tahap administrasi persiapan kredit, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pejabat kredit di Bank Jabar Cabang Soreang, penulis dapat menganalisa bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai kredibilitas calon debitur dilakukan wawancara terlebih dahulu dengan tujuan calon debitur mengetahui bagaimana tata cara pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil dan mengetahui penggunaan kredit tersebut.

Pada tahap administrasi analisa kredit, pejabat kredit yang berwenang di Bank Jabar Cabang Soreang menganalisis semua data dan berkas permohonan kredit Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh calon debiturnya. Pejabat analis juga melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut. Sedang untuk tahap administrasi keputusan kredit, pengambilan keputusan baik itu keputusan persetujuan kredit maupun penolakan kredit dilakukan oleh pejabat Bank Jabar Cabang Soreang yang ditunjuk atau oleh pimpinan Bank Jabar Cabang Soreang.

Pengambilan keputusan ini dilakukan setelah diketahui hasil analisis yang dilakukan oleh pejabat analis kredit

Kemudian memasuki pada tahap administrasi pencairan kredit dimana pencairan kredit dapat dilakukan melalui kas maupun tabungan dengan nota debet atau kredit. Pembukuan yang dilakukan adalah Jurnal Terima Uang (JTU) dimana yang termasuk didalamnya adalah biaya provisi dan asuransi, Jurnal Bayar Uang (JBU), dan Jurnal Mutasi Perkiraan (JMP) kemudian mempersiapkan jadwal angsuran pembayaran kredit untuk bulan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah tahap administrasi pembayaran dan pelunasan kredit, dengan ketentuan setiap pembayaran dan pelunasan kredit maka kartu prima nota debitur diberi cap lunas (apabila lunas) dan dicatat tanggal pembayaran dan pelunasannya yang kemudian diparaf oleh pejabat yang berwenang sebagai tanda pengesahan. Dalam tahap administrasi dokumentasi dan pelaporan dilakukan pengecekan semua berkas-berkas permohonan kredit yang telah disetujui kemudian setelah diregister kedalam buku registrasi kredit sebagai dokumentasi bagi bank.

4.2. Analisa Persyaratan pada Kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang

Dalam pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang, calon debitur terlebih dahulu mengisi formulir-formulir isian yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Dalam formulir tersebut terdapat persyaratan permohonan kredit Pegawai Negeri Sipil yang harus dipenuhi oleh calon debitur baik persyaratan pada saat permohonan maupun saat pelunasan kewajibannya

pada pihak bank selain dari hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kredit sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam hal pemberian kredit.

Untuk persyaratan kredit Pegawai Negeri Sipil perorangan harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) terakhir asli pengangkatan sebagai pegawai, surat TASPEN asli, foto copy kartu pegawai yang bertujuan sebagai jaminan bagi pihak bank dari debiturnya, surat kuasa pemotongan gaji yang disetujui oleh atasan langsung yang tujuannya untuk angsuran pembayaran kredit.

4.3. Analisa Peranan Administrasi Kredit Pegawai Negeri Sipil dalam Memperlancar Kredit di Bank Jabar Cabang Soreang

Berdasarkan dari tabel mengenai perkembangan tingkat kelancaran pinjaman yang diberikan periode tahun 1995 sampai dengan 1998, penulis menganalisa bahwa :

1. Total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1996 mencapai 2.11% dan total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1995 mencapai 3.01%, ini berarti bahwa total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1996 terdapat penurunan sebesar 0,90%.
2. Total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1997 mencapai 1.24%, dan total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1996 mencapai 2.11%, berarti bahwa total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1997 terdapat penurunan sebesar 0.87%.
3. Total kredit kurang lancar, diragukan, macet pada tahun 1998 mencapai 2.10% dan pada tahun 1997 mencapai 1.24%, berarti total kredit kurang

lancar, diragukan, macet pada tahun 1997 terdapat kenaikan 0.86%. Adapun persentase Dapersus pada tahun 1998 mencapai 2.19%.

4. Rata-rata total kredit kurang lancar, diragukan, macet sejak tahun 1995 sampai dengan 1998 mencapai 2.115%.

Dari uraian diatas dapat penulis jelaskan bahwa peranan kredit Pegawai Negeri Sipil dalam memperlancar kredit sangat potensial sekali mengingat sebagian besar kredit yang disalurkan oleh pihak bank adalah melalui kredit Pegawai Negeri Sipil ini. Dan juga dari data diatas menyatakan bahwa kredit lancar sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan angka kenaikan rata-rata sebesar 0.885% untuk setiap tahunnya. Tahun 1998 terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini terjadi oleh faktor ekstern bank Selain itu juga dengan adanya peranan administrasi kredit Pegawai Negeri Sipil dalam memperlancar kredit di Bank Jabar Cabang Soreang yang semakin meningkat maka proses pelelangan barang jaminan tidak terjadi sampai saat sekarang.

4.4. Analisa Permasalahan dan Cara Pemecahan dalam Kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang

Permasalahan yang dihadapi dalam kredit Pegawai Negeri sipil di Bank Jabar Cabang Soreang pada umumnya adalah debitur meninggal dunia atau debitur dimutasikan. Untuk mengantisipasinya pihak bank telah membuat ketentuan terhadap permasalahan tersebut yaitu untuk debitur meninggal dunia maka pada saat akad kredit terlebih dahulu dimasukkan dalam asuransi jiwa dan untuk debitur yang dimutasikan biasanya pihak meminta agar pihak debitur melunasi kreditnya sekaligus.